

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

UMKM terbukti telah mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi bangsa dengan berkesinambungan. Melihat peran tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan UMKM dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri, dan modern (IAI, 2016. diakses dari <http://iaiglobal.or.id> pada tanggal 23 Pebruari 2020).

Sebagai wujud memenuhi komitmen untuk memajukan perekonomian bangsa, pada tanggal 24 Oktober 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dalam rapatnya, telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau SAK EMKM. SAK EMKM ini dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (IAI, 2016. diakses dari <http://iaiglobal.or.id> pada tanggal 23 Pebruari 2020).

Menurut Wibowo, (2020) diakses dari <http://www.wibowopajak.com> pengertian entitas berdasarkan konsep Akuntansi, adalah suatu unit usaha atau merupakan kesatuan akuntansi dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi dari suatu unit sebagai fokus utamanya. Kesatuan akuntansi bisa

berupa kegiatan atau fungsi saja. Dengan demikian EMKM bisa disebut dengan UMKM.

**a. Pengertian UMKM**

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, Bab IV Pasal 1, adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sesuai UU 20/2008 Bab IV Pasal 6 (1).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sesuai UU 20/2008 Bab IV Pasal 6 (2).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria sesuai UU 20/2008 Bab IV Pasal 6 (3).

**b. Asas dan Tujuan UMKM**

Asas UMKM menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, Bab II Pasal 2 adalah kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan,

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan UMKM menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, Bab II Pasal 3 adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasar pada demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

**c. Kriteria UMKM**

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, Bab IV Pasal 6, adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

## **2. Laporan Keuangan**

### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut IAI, (2016) Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja dari entitas tersebut. Laporan keuangan berguna bagi kreditur, banker, pemilik usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan konsisi entitas (IAI, 2016. dalam Ningtyas, 2017)

Sedangkan Diana dan Lilis, (2017:17) berpendapat bahwa “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan”.

### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1, yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan

keuangan untuk membuat keputusan ekonomi (IAI, revisi 2009 dalam Diana dan Lilis, 2017:17).

Tujuan Laporan Keuangan Menurut *Accounting Principle Board Statement* No. 4 (dalam Harahap, 2015:126-128) memuat tujuan khusus, tujuan umum, dan tujuan kualitatif. Tujuan-tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Khusus laporan keuangan adalah penyajian laporan posisi keuangan, hasil usaha entitas, dan perubahan posisi keuangan lain-lain. Disusun secara wajar sesuai dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principle*).
2. Tujuan Umum laporan keuangan adalah :
  - a. Memberikan informasi terpercaya mengenai sumber ekonomi, dan kewajiban entitas.
  - b. Memberikan informasi terpercaya mengenai sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha entitas dalam mencari keuntungan.
  - c. Menaksir informasi keuangan, sehingga dapat digunakan untuk menaksi potensi entitas dalam menghasilkan keuntungan.
  - d. Memberikan informasi mengenai perubahan harta dan kewajiban.
  - e. Mengungkapkan informasi relevan untuk para pengguna laporan keuangan.

3. Tujuan Kualitatif Laporan Keuangan yaitu :

- a. Relevan (*Relevance*), adalah laporan keuangan memberikan informasi yang sesuai dan membantu dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.
- b. Dapat dimengerti (*Understandability*), adalah laporan keuangan tersebut disajikan bukan hanya penting tetapi juga harus dimengerti bagi para penggunanya.
- c. Dapat diverifikasi (*Verifiability*), adalah laporan keuangan tersebut dapat diverifikasi atau dapat diperiksa oleh pihak lain dan akan menghasilkan pendapat yang sama.
- d. Netral (*Neutrality*), adalah laporan keuangan tersebut netral dari pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dimaksudkan untuk pihak-pihak umum bukan hanya pihak-pihak tertentu.
- e. Ketepatan waktu (*Timeliness*), adalah laporan keuangan tersebut memiliki manfaat untuk pengambilan keputusan, jika digunakan pada saat yang tepat.
- f. Dapat dibandingkan (*Comparability*), adalah laporan keuangan harus dapat dibandingkan, artinya informasi tersebut harus memiliki prinsip yang sama, baik untuk entitas satu dengan entitas yang lain.
- g. Lengkap (*Completeness*), adalah informasi yang dilaporkan tersebut harus mencakup semua kebutuhan para pengguna.

### c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Jenis-jenis laporan Keuangan menurut PSAK 1 dalam Martani, dkk (2016:10) yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan proses penyajiannya, menurut Hery, (2015) adalah sebagai berikut :

1. Laporan Laba Rugi, adalah laporan sistematis mengenai pendapatan dan beban perusahaan untuk periode tertentu dengan memuat informasi kinerja hasil usaha entitas.
2. Laporan Ekuitas Pemilik, adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas pemilik suatu entitas untuk periode tertentu.
3. Laporan Neraca, adalah laporan sistematis mengenai posisi harta, kewajiban (utang) dan ekuitas entitas per tanggal tertentu. Laporan neraca digunakan untuk mengetahui gambaran posisi keuangan suatu entitas.
4. Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas entitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan untuk periode tertentu.
5. Catatan atas laporan keuangan, adalah catatan yang menjelaskan mengenai suatu informasi yang lebih lengkap dan terperinci dari laporan keuangan.

### 3. Standar Akuntansi Keuangan EMKM

Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia, senantiasa berkomitmen turut memajukan perekonomian negara. Sebagai bagian organisasi IAI mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar akuntansi keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau SAK EMKM. SAK EMKM ini sengaja dibuat sederhana agar menjadi standar yang mudah dipahami pelaku UMKM di Indonesia yang berjumlah sekitar 57,9 juta. SAK EMKM ini berlaku efektif per 1 Januari 2018 (IAI, 2016. diakses dari <http://iaiglobal.or.id> pada tanggal 23 Pebruari 2020).

#### a. Ruang Lingkup

Dalam buku SAK EMKM (2016:1) disebutkan bahwa SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah. Entitas mikro, kecil dan menengah yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, serta memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria tersebut diatas, dapat menggunakan SAK EMKM. Jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasar SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) (IAI, 2016:1).

## **b. Kebijakan Akuntansi SAK EMKM**

Dalam buku SAK EMKM, (2016:15) Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik yang diterapkan oleh entitas atau perusahaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. SAK EMKM secara spesifik telah mengatur perlakuan akuntansi suatu peristiwa, transaksi, atau keadaan lain, maka perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai pengaturan dalam SAK EMKM. Jika SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi suatu peristiwa, transaksi, atau keadaan lain, maka perusahaan hanya mempertimbangkan dan mengacu pada definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan (IAI, 2016:15).

### **1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan**

Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan merupakan suatu proses pembentukan pos dalam laporan keuangan yakni aset, liabilitas, ekuitas atau laporan laba rugi yakni penghasilan dan beban yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (a) manfaat ekonomi yang terkait dengan pos laporan posisi keuangan dan pos laporan laba rugi dapat dipastikan mengalir kedalam atau keluar dari entitas, dan (b) pos-pos atau akun tersebut memiliki biaya yang bisa diukur dengan andal (IAI, 2016: 4).

## 2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan dan beban pada laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur-unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayar untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayar untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal (IAI, 2016: 5).

## 3. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Penyajian wajar dari laporan keuangan mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban. Sedangkan pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai guna memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas (IAI, 2016: 7).

Dalam buku SAK EMKM, laporan keuangan minimum adalah Laporan Posisi keuangan pada akhir periode, Laporan laba rugi selama periode, dan Catatan atas laporan keuangan,

yang berisi tambahan dan rincian mengenai akun-akun tertentu yang relevan. Sedangkan laporan keuangan yang lengkap artinya perusahaan menyajikan minimum dua periode untuk setiap laporan keuangan yang telah disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan terkait (IAI, 2016: 8).

### **c. Laporan Keuangan SAK EMKM**

#### **1. Laporan Posisi Keuangan**

Laporan Posisi Keuangan atau Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan, terdiri atas informasi mengenai aset, liabilitas dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu (IAI, 2016: 9). Unsur-unsur laporan posisi keuangan atau neraca didefinisikan sebagai berikut :

- a. Asset atau harta adalah sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharap akan diperoleh perusahaan (IAI, 2016: 3).
- b. Liabilitas adalah kewajiban masa kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi (IAI, 2016: 3).
- c. Ekuitas atau Modal adalah hak residual aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas (IAI, 2016: 4).

## 2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menyajikan informasi kinerja keuangan perusahaan, terdiri atas penghasilan dan beban selama periode pelaporan (IAI, 2016: 11). Unsur-unsur laporan Laba Rugi atau laporan kinerja didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan atau *income* adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan berbentuk arus kas masuk (kenaikan aset), atau penurunan liabilitas yang berakibat naiknya ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (IAI, 2016: 4).
- b. Beban atau *expenses* adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan berbentuk arus kas keluar (penurunan aset), atau kenaikan liabilitas yang berakibat turunnya ekuitas yang tidak disebabkan dari distribusi pada penanam modal (IAI, 2016: 4).

## 3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi perusahaan, informasi tambahan dan rincian suatu akun yang menjelaskan transaksi penting, material, dan mempunyai manfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan (IAI, 2016: 13).

## d. Contoh Laporan Keuangan

### 1. Laporan Laba Rugi

Gambar 2.1 Contoh Laporan Laba Rugi

CV. TATA PRATHAMA Laporan Laba Rugi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014		
<b>Pendapatan</b>		<b>Rp. 7.289.376.658</b>
<b>Harga Pokok Penjualan Laba Kotor</b>		(Rp. 6.495.183.336) <b>Rp. 794.193.322</b>
<b>Beban Usaha :</b>		
1. Beban Administrasi dan Umum	Rp. 489.609.222	
2. Beban Pemasaran	<u>Rp. 49.023.050</u>	
<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b>(Rp. 538.632.272)</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pos Lain-lain</b>		<b>Rp. 255.561.050</b>
Pendapatan dan Beban Lain-lain		<u>(Rp. 41.004.548)</u>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>		<b>Rp. 214.556.502</b>

Sumber: Wardayanti, Siti Maria. (2016:61) diolah penulis

### 2. Laporan Posisi Keuangan

Gambar 2.2 Contoh Laporan Posisi Keuangan

CV. TATA PRATHAMA Laporan Posisi Keuangan Per 31 Januari 2014			
ASET		LIABILITAS DAN EKUITAS	
<b>Aset Lancar</b>		<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Kas dan Setara Kas	Rp. 897.548.321	Utang Dagang	Rp. 667.441.630
Piutang Usaha	Rp. 4.183.465.444	Titipan	Rp. 5.101.474.470
Biaya Dibayar Dimuka	Rp. 1.467.919.526	Utang Bank Jatuh Tempo	Rp. 450.000.000
Persediaan Barang Dagang	<u>Rp. 891.186.638</u>	Utang Kendaraan Jatuh Tempo	<u>Rp. 106.080.000</u>
<b>Total Aset Lancar</b>	<b><u>Rp. 7.440.119.929</u></b>	<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>Rp. 6.325.596.100</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>		<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Penyertaan Pada Perusahaan	Rp. 86.813.423	Utang Kendaraan	Rp. 141.230.000
<b>Aset Tetap</b>		Utang Bank	Rp. -
Kendaraan	Rp. 698.949.122	<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>Rp. 141.230.000</b>
Akum Penyusutan Kendaraan	<u>(Rp. 278.000.843)</u>	<b>Total Liabilitas</b>	<b><u>Rp. 6.466.826.100</u></b>
<b>Total Aset Tetap</b>	<b><u>Rp. 420.948.288</u></b>	<b>EKUITAS</b>	
		Modal Pemilik	Rp. 1.266.499.038
		Laba Bersih	<u>Rp. 214.556.502</u>
		<b>Total Ekuitas</b>	<b><u>Rp. 1.481.055.540</u></b>
<b>Total Aset</b>	<b>Rp. 7.947.881.640</b>	<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>Rp. 7.947.881.640</b>

Sumber: Wardayanti, Siti Maria. (2016:60) diolah penulis

### 3. Catatan Atas Laporan Keuangan

CV. TATA PRATHAMA  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
31 Januari 2019

#### 1. UMUM

CV. Tata Prathama didirikan tanggal 16 Februari 2009 nomor 12 oleh notaris Achmad Muthar. Entitas telah memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jember yaitu 02.884.236.7-626.000.

Kegiatan Utama Entitas adalah dibidang penjualan dan servis komputer dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- *Computer & Accessories*
- *Service & Maintenance*
- *Software Engineering*
- *Computer Second*

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

##### a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

##### b. Dasar Penyusunan

Jumlah yang disajikan pada laporan keuangan dan catatannya telah menjadi rupiah penuh

##### c. Piutang Dagang

Piutang Dagang disajikan berdasar nilai bruto. Entitas belum melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

##### d. Persediaan

Persediaan dinilai dan disajikan berdasar metode *First in first out* (FIFO) Perpetual

##### e. Aset Tetap

1. Tingkat materialitas Aset tetap yang ditentukan atas dasar masa manfaat dan/atau jumlah nominalnya, yaitu:
  - Harga Perolehan Minimal Rp. 50.000.000
  - Biaya Perbaikan Minimal Rp. 500.000.000
2. Penyusutan pada entitas telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan Metode Garis Lurus.

##### f. Pendapatan

Pengakuan Pendapatan sebagai berikut :

1. Pendapatan atas penjualan barang dagang diakui saat terjadi transaksi.
2. Pendapatan jasa lain-lain diakui saat kas diterima.

##### g. Beban

Beban umumnya *accrual basis*, kecuali untuk pos beban rutin dan tidak material perbedaan dicatat dengan metode *cash basis*.

#### 3. KAS dan SETARA KAS Terdiri dari :

Kas	Rp. 3.757.240
Bank	<u>Rp. 893.791.081</u>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b><u>Rp. 897.548.321</u></b>

#### 4. PIUTANG USAHA Terdiri dari :

Piutang dagang	Rp. 3.530.214.444
Piutang Uang	<u>Rp. 653.251.000</u>
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b><u>Rp. 4.183.465.000</u></b>
<b>5. BIAYA DIBAYAR DIMUKA</b> <b>Terdiri dari :</b>	
Sewa Kantor	Rp. 17.240.000
Sewa Garasi	Rp. 15.800.000
Sewa Gudang	Rp. 8.600.000
Panjar	<u>Rp. 1.426.279.526</u>
<b>Jumlah Biaya Dibayar Dimuka</b>	<b><u>Rp. 1.467.919.526</u></b>
<b>6. PERSEDIAAN</b>	
Saldo persediaan per 31 Desember 2014 yang terdapat distok gudang yaitu berjumlah Rp. 891.186.638.	
<b>7. PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN</b>	
Saldo penyertaan pada perusahaan per 31 Desember 2014 yaitu berjumlah Rp. 86.813.423.	
<b>8. ASET TETAP</b>	
Saldo harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 698.949.122 sedangkan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp. 278.000.843	
<b>9. UTANG DAGANG</b>	
Saldo utang dagang per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 667.441.630	
<b>10. TITIPAN</b>	
Saldo titipan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 5.101.474.470	
<b>11. UTANG BANK JATUH TEMPO</b> <b>Terdiri dari :</b>	
Utang Giro Bank Jatim	Rp. 400.000.000
Utang Koperasi Bank Jatim	<u>Rp. 50.000.000</u>
<b>Jumlah Utang Bank Jatuh Tempo</b>	<b><u>Rp. 450.000.000</u></b>
<b>12. UTANG KENDARAAN</b> <b>Terdiri dari :</b>	
Harga Perolehan	Rp. 247.910.000
Utang Kendaraan Jatuh Tempo	<u>Rp. 106.680.000</u>
<b>Jumlah Utang Kendaraan</b>	<b><u>Rp. 141.230.000</u></b>
<b>13. MODAL</b>	
Saldo modal per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.481.055.540	
<b>14. PENDAPATAN</b> <b>Terdiri dari :</b>	
Penjualan Komputer	Rp. 7.176.381.538
Pendapatan Jasa Servis	<u>Rp. 112.995.120</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b><u>Rp. 7.289.376.658</u></b>
<b>15. HARGA POKOK PENJUALAN</b>	
Saldo harga pokok penjualan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 6.495.183.336	

16. **BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM**

Terdiri dari :

Beban gaji karyawan	Rp. 157.435.000
Beban THR	Rp. 16.700.000
Beban administrasi dan fotocopy	Rp. 18.883.300
Beban listrik dan air	Rp. 7.504.565
Beban telepon	Rp. 49.710.716
Beban depresiasi aktiva tetap	Rp. 123.770.811
Beban pemeliharaan kendaraan dan gedung	Rp. 16.593.400
Beban rumah tangga	Rp. 10.933.150
Beban pajak	Rp. 4.969.357
Beban premium dan perjalanan dinas	Rp. 37.942.056
Beban pengangkutan	Rp. 35.440.000
Beban sewa	Rp. 8.914.667
Beban lembur	Rp. 812.200
<b>Jumlah beban administrasi dan umum</b>	<b><u>Rp. 489.609.222</u></b>

17. **PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN**

Terdiri dari :

Pendapatan bunga bank	Rp. 1.568.778
Pendapatan lain-lain	Rp. 280.371.402
Beban administrasi bank & PPh bunga bank	(Rp. 38.090.206)
Beban bunga hutang	(Rp. 129.453.543)
Beban sumbangan	(Rp. 5.564.900)
Beban barang hilang/rusak	(Rp. 26.319.799)
Beban lain-lain	(Rp. 94.608.780)
Beban entertainment	(Rp. 16.357.500)
Beban reward	(Rp. 12.550.000)
<b>Jumlah Pendapatan Dan Beban Lain-Lain</b>	<b>(Rp. 41.004.548)</b>

Sumber: Wardayanti, Siti Maria. (2016:64-69) diolah penulis

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

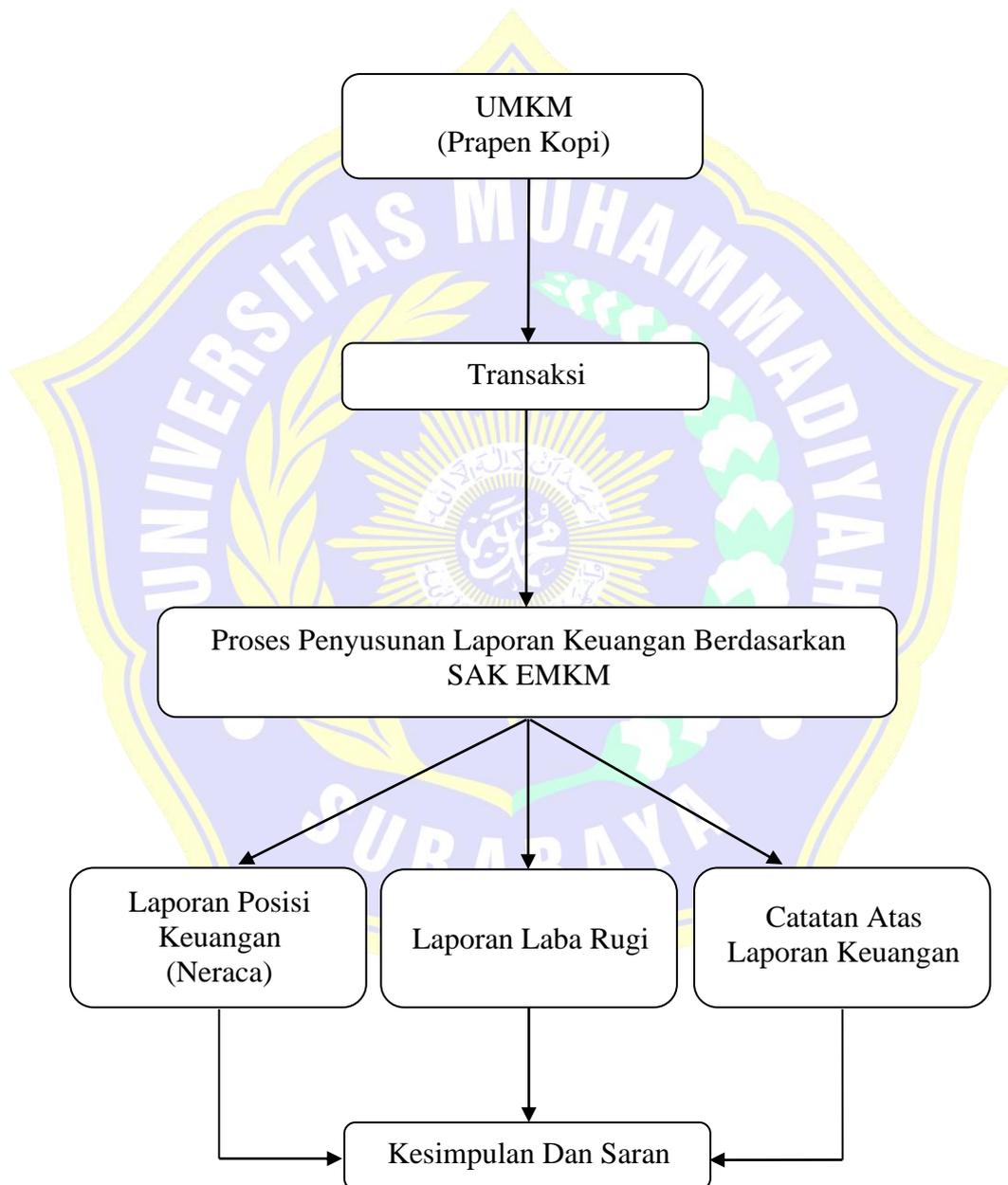
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Shonhadji, Nanang. dkk. 2017	Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berdasarkan SAK EMKM di Surabaya	Usaha <i>laundry</i> tersebut tidak melakukan pencatatan berdasarkan standar akuntansi berlaku yakni SAK EMKM. Usaha ini hanya memiliki pencatatan keuangan sebatas pemasukan dan pengeluaran kas (Shonhadji, dkk. 2017).	<p>a. Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM.</p> <p>b. UMKM mencatat pemasukan dan pengeluaran kas.</p>	Objek Penelitian
2.	Ningtyas, Jilma Dewi Ayu. 2017	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Studi Kasus di UMKM Bintang Malam Pekalongan	Usaha tersebut belum melakukan pencatatan berdasar SAK EMKM. Usaha tersebut hanya menggunakan nota yang dibukukan, sehingga informasi yang dihasilkan hanya informasi penjualan dan penerimaan barang (Ningtyas, 2017).	<p>a. Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM.</p> <p>b. UMKM memiliki informasi sebatas penjualan dan penerimaan barang.</p>	Objek Penelitian
3.	Rusadi, Yumni. 2019	Simulasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada PT Ryan Putera Ar-Rizqy	Usaha tersebut sudah melakukan pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Namun laporan keuangan yang disajikan hanya laporan Laba Rugi, dan belum sesuai dengan SAK EMKM (Rusadi, 2019)	<p>a. Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM.</p> <p>b. UMKM Melakukan pencatatan transaksi hingga laporan laba rugi saja.</p>	Objek Penelitian

Sumber : Hasil kajian penulis

### C. Kerangka Konseptual

Dari beberapa konsep serta teori tersebut secara berurutan akan tersaji kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu :

Gambar 2.8 Kerangka Konseptual



Sumber : Kajian Penulis, 2020

Keterangan :

UMKM objek penelitian memiliki bukti transaksi namun belum melakukan pencatatan sesuai dengan SAK EMKM. Objek penelitian melakukan pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran kas, setelah itu dilakukan penyusunan laporan laba rugi sederhana untuk mengetahui masuk dan keluarnya kas, perolehan laba atau rugi entitas, serta sebagai acuan dalam membayar pajak.

Untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, dilakukan siklus akuntansi secara lengkap. Semua bukti transaksi yang sudah dikumpulkan dari arsip objek penelitian, selanjutnya diproses untuk menyusun laporan keuangan, yaitu pencatatan jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian untuk proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yaitu Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Setelah itu didapatkan hasil dan kesimpulan penelitian.